

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Pembahasan mengenai kebijakan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat kepada senjata nuklir Korea Utara bukan merupakan hal yang baru. Konflik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara mengenai senjata nuklir telah menjadi perhatian bagi media internasional bertahun-tahun lamanya, sehingga telah menghasilkan beragam macam penelitian dari para akademis yang membahas topik tersebut. Namun, analisis terkini mengenai bagaimana respon yang diberikan Korea Utara terhadap banyaknya sanksi yang diberikan hingga dampak ekonomi yang dialami Korea Utara pasca sanksi ekonomi tersebut diberlakukan masih sangat langka penulis temukan. Dalam tinjauan pustaka kali ini, penulis akan memaparkan beberapa literatur terdahulu yang membahas seputar kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap senjata nuklir milik Korea Utara.

Penelitian pertama yang penulis temukan adalah tulisan milik Yohana Putri Lusita yang berjudul “Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terkait Program Nuklir dan *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)*”. Dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat terkait program nuklir dan ICBM Korea Utara. Dalam tulisannya, Yohana mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Pertama faktor yang datang dari dalam negeri dan dijelaskan melalui dua variabel yaitu, *domestic politics* dan *economic-military factors*, faktor kedua dari batas wilayah negara yang dijelaskan melalui variabel *international circumstances*, dan yang terakhir ada faktor dari dalam diri yaitu variabel pembuat kebijakan atau *decision making behavior*. Persamaan antara tulisan dengan penelitian penulis saat ini terletak pada fenomena dan aktor yang membahas tentang kebijakan Amerika Serikat kepada Korea Utara. Lalu yang membedakan antara penelitian penulis dengan tulisan “Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terkait Program Nuklir dan *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)*” adalah objek penelitian

lebih memfokuskan terhadap faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan sanksi ekonomi tersebut dan juga dijelaskan *decision making behavior* dari Presiden Amerika Serikat terdahulu, yaitu Donald Trump.

Penelitian kedua yang akan penulis jabarkan adalah tulisan milik Geno Vybra Yoga, Bima Jon Nanda, dan Sofia Trisni yang memiliki judul “Respon Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump Terhadap Program Nuklir Korea Utara”. Dan melalui judul tulisan ini dapat dijabarkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada bagaimana respon yang diberikan Amerika Serikat terhadap nuklir Korea Utara melalui tindakan *deterrence*. Menurut VandenBos (2007), *deterrence* merupakan gagasan persuasif dengan mempertimbangkan posisi negara aliansi untuk mendudukkan posisi negara lain yang dianggap sebagai ancaman oleh negara sekutu yaitu agar tidak menyerang negara sekutu suatu negara. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bentuk tindakan *deterrence* Amerika Serikat terhadap Korea Utara mengenai senjata nuklirnya, dan disebutkan ada tiga bentuk tindakan yang dilakukan yaitu: pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan PBB melalui Amerika Serikat terhadap Korea Utara, penguatan sektor pertahanan Amerika Serikat dengan melakukan aliansi dengan Korea Selatan, dan perundingan Amerika Serikat dengan Korea Utara melalui Konferensi Tingkat Tinggi. Berbeda dengan tulisan ini, penelitian yang penulis lakukan akan lebih terfokuskan pada bagaimana respon Korea Utara terhadap berbagai macam sanksi ekonomi yang diberikan dari Amerika Serikat.

Berikutnya penelitian ketiga yang penulis temukan adalah milik Rianto Ammar Tanajaya yang berjudul “Strategi Negosiasi Korea Utara Terhadap Kesepakatan Denuklirisasi Dengan Amerika Serikat Tahun 2017-2019”. Dalam tulisan ini, Rianto Ammar mengungkapkan bahwa sanksi ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan PBB atas senjata nuklir Korea Utara sangat mempengaruhi perekonomian Korea Utara dan mempengaruhi pemerintahan Kim Jong Un. Sehingga dijelaskan pada penelitian tersebut, pemerintahan Korea Utara melakukan negosiasi terhadap kesepakatan denuklirisasi dengan Amerika Serikat meskipun produksi senjata nuklir ini merupakan salah satu kekuatan yang menjadi keunggulan bagi Korea Utara. Dan strategi negosiasi ini diteliti menurut konsep

Strategy and Tactic in Negotiations dari Dean G. Pruitt dan Peter J. Carneval. Terdapat persamaan dan perbedaan yang mencolok antara penelitian penulis dengan penelitian milik Rianto Ammar. Persamaannya terletak pada bagaimana respon yang diberikan Korea Utara terhadap berbagai macam sanksi ekonomi yang dikeluarkan Amerika Serikat dan PBB. Namun yang menjadi pembeda disini adalah pada rentang waktu penelitian, dimana penulis akan meneliti sikap dan respon Korea Utara terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat hingga tahun 2022.

Penelitian keempat yang penulis temukan adalah milik Prof. Dr. Ichlasul Amal dengan rekannya Uni Claritha Cendrawati Warembai yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Masalah Nuklir Korea Utara”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana Amerika Serikat melakukan diplomasi atau negosiasi untuk terwujudnya denuklirisasi Korea Utara tanpa melakukan invasi. Terlihat juga dengan Amerika Serikat memberikan beberapa bantuan ekonomi ke Korea Utara demi membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Persamaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah penulis tetap akan membahas kebijakan yang diberikan Amerika Serikat terhadap program nuklir Korea Utara. Namun, tetap ada perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penulis akan memfokuskan terhadap sisi Korea Utara dengan respon yang dikeluarkan dan dampak yang mereka terima terhadap kebijakan tersebut.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yohana Putri Lusita	“Kebijakan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terkait Program Nuklir dan <i>Intercontinental Ballistic Missile</i> (ICBM)”	Fenomena dan aktor yang membahas tentang kebijakan Amerika Serikat kepada Korea Utara mengenai program nuklir Korea Utara.	Objek penelitian lebih memfokuskan terhadap faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan sanksi ekonomi tersebut dan juga dijelaskan dengan <i>decision making behavior</i> dari Presiden Amerika Serikat

				terdahulu, yaitu Donald Trump.
2.	Geno Vybra Yoga, Bima Jon Nanda, dan Sofia Trisni	“Respon Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump Terhadap Program Nuklir Korea Utara”	Masih dengan fenomena yang sama yaitu mengenai program nuklir Korea Utara	Objek penelitian memfokuskan tentang bagaimana respon Amerika Serikat terhadap program nuklir Korea Utara dengan menggunakan konsep <i>deterrence</i> .
3.	Rianto Ammar Tanajaya	“Strategi Negosiasi Korea Utara Terhadap Kesepakatan Denuklirisasi Dengan Amerika Serikat Tahun 2017-2019”	Membahas bagaimana respon Korea Utara terhadap kebijakan sanksi ekonomi yang diberikan dari Amerika Serikat	Objek penelitian memfokuskan pada bagaimana strategi yang digunakan Korea Utara dalam kesepakatan denuklirisasi dengan konsep <i>Strategy and Tactic in Negotiations</i> .
4.	Prof. Dr. Ichlasul Amal, Uni Claritha Cendrawati Warembai	“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Masalah Nuklir Korea Utara”	Membahas kebijakan Amerika Serikat terhadap program nuklir Korea Utara.	Objek penelitian hanya berfokus pada tindakan Amerika Serikat saja dengan kebijakannya.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

K. J. Holsti dalam bukunya yang berjudul *International Politics: A Framework for Analysis* (1983) menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai kombinasi orientasi, peran nasional, tujuan, dan tindakan (Holsti, 1983). Orientasi mengacu pada sikap dan komitmen umum terhadap lingkungan eksternal, dan itu menggabungkan strategi dasar untuk mencapai tujuan domestik dan eksternal, terutama dalam mengatasi ancaman yang terus berlanjut. Strategi dan orientasi ini jarang terungkap pada keputusan siapa pun, tetapi hasil dari serangkaian keputusan yang kumulatif ini digunakan untuk menyesuaikan tujuan, nilai negara, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal.

Peran nasional mengacu pada pengambilan keputusan tentang keputusan umum, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan keadaan negara mereka dan persepsi tentang bagaimana yang seharusnya negara lakukan dalam berbagai pengaturan geografis dan masalah. Tujuan adalah gambaran atau kondisi yang diharapkan dapat dicapai di masa depan dengan memegang pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain. Dan tindakan adalah kebijakan aktual yang dilakukan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Sebelumnya, Holsti juga pernah mengusulkan 4 tipologi restrukturisasi dalam kebijakan luar negeri (Holsti, 1982):

- Tipologi pertama adalah Isolasi, ditandai dengan tingkat keterlibatan eksternal yang sangat rendah dikombinasikan dengan kebijakan eksklusivisme komprehensif. Akibatnya, "komitmen militer dan diplomatik dihindari", dan transaksi yang diarahkan eksternal sedikit, yang pada gilirannya mengurangi pentingnya arah kebijakan luar negeri.

- Tipologi kedua adalah Kemandirian, ditandai dengan diversifikasi dalam perdagangan, kontak diplomatik dan budaya. Namun, tingkat transaksi masih rendah dan komitmen militer dihindari.
- Tipologi ketiga adalah Ketergantungan, mengacu pada situasi di mana "tindakan dan transaksi terarah eksternal berada pada tingkat yang cukup tinggi", dan konsentrasi terhadap negara lain juga tinggi.
- Tipologi keempat adalah Diversifikasi netral, ditandai dengan tindakan dan transaksi terarah eksternal yang luas dengan banyak negara yang berbeda.

2.2.2 Economic Statecraft

Literatur mengenai *economic statecraft* memiliki dua keterbatasan penting. Pertama, dari pengamatan David A. Baldwin (1995) bahwa berbagai bentuk *economic statecraft* mengikuti logika yang sama dan Hirschman (1980) juga mengatakan bahwa intensif ekonomi mempengaruhi negara, karena adanya kemungkinan mereka (negara) akan menciptakan sanksi ekonomi di masa depan, dan dengan literatur yang ada akan memperlakukan sanksi ekonomi dan insentif ekonomi sebagai dua hal yang berbeda secara analitis. Kedua, banyak literatur yang membahas perdebatan mengenai apakah sanksi ekonomi atau insentif ekonomi dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting, dengan kurang memperhatikan masalah yang lebih relevan dengan kebijakan dari ‘kapan’ dan ‘dalam kondisi apa’ *economic statecraft* dapat mencapai semua tujuan-tujuan ini (Blanchard & Ripsman, 2008).

David A. Baldwin menjelaskan bahwa *economic statecraft* digambarkan sebagai usaha negara yang terencana untuk mengubah kebijakan atau perilaku negara lain sehingga tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dan dalam terciptanya usaha tersebut, ada unsur *power* di dalamnya yaitu unsur sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. David A. Baldwin juga mengatakan bahwa *economic statecraft* terbagi dari dua kategori, *negative sanction* dan *positive sanction*. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, sanksi positif didefinisikan sanksi yang diberikan dengan cara memberikan atau menjanjikan suatu ‘hadiah’ terhadap negara yang ditargetkan, sedangkan sanksi negatif

didefinisikan sanksi yang diberikan dengan cara memberikan atau mengancam hukuman terhadap negara yang dituju (contoh: embargo) (Baldwin, 1985).

Economic Statecraft juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan ofensif dan defensif dari negosiasi perdagangan hingga kontrol teknologi untuk memajukan kepentingan komersial dan strategis suatu negara. Dalam melakukan hubungan internasional, tidak ada negara lain yang menerapkan sanksi ekonomi lebih dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan sanksi untuk mengekang proliferasi nuklir, menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, mendorong demokratisasi, mengganggu konflik, dan menghilangkan praktik perdagangan yang tidak adil.

2.2.3 The Sanctions Paradox

Buku *The Sanctions Paradox* oleh Daniel Drezner pada tahun 1999, ditulis menggunakan latar belakang studi kasus Uni Soviet (Rusia) pada tahun 1990-an. Buku ini berisi tentang peran pemaksaan ekonomi dalam hubungan internasional. Buku ini menciptakan model untuk menjelaskan perilaku negara pengirim dan negara target dengan mempertimbangkan biaya peluang kebuntuan dan harapan konflik di masa depan dengan satu sama lain. Dengan latar belakang studi kasus Uni Soviet (Rusia) pada tahun 1990, ditemukan tiga poin utama dari buku tersebut, (1) bahwa Rusia terus menggunakan sanksi ekonomi secara ekstensif untuk mempengaruhi keputusan politik di NIS pada tahun 2000-an, (2) bahwa sanksi tersebut jauh kurang efektif dibandingkan pada tahun 1990-an, (3) bahwa model Drezner terus menjelaskan upaya sanksi ternyata kurang akurat dalam prediksinya dibandingkan tahun 1990-an. Model yang disebutkan di sini adalah Model Ekspektasi Konflik, yang akan memprediksikan apakah 'negara si pengirim' akan menggunakan sanksi ekonomi untuk memperoleh konsesi dari 'negara yang ditarget' dan apakah 'negara yang ditargetkan' tersebut mengaku atau bahkan menolak putusan tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa ada negara yang menggunakan sanksi ekonomi dalam melakukan suatu hubungan internasional. Pertama, karena sanksi ekonomi termasuk dalam instrumen non-militer dan tidak menggunakan kekerasan, sehingga lebih disenangi oleh masyarakat internasional. Kedua,

penggunaan sanksi ekonomi terlihat lebih 'murah' dibandingkan dengan intervensi militer, walaupun ada saat dimana sanksi ekonomi juga sama-sama bersifat memaksa. Ketiga, walaupun sanksi ekonomi gagal dalam membawa perubahan politik yang diinginkan, mereka sebagai negara pengirim masih dapat melakukan pemaksaan terhadap kepala negara yang ditargetkan, dengan memperhitungkan semua biaya sanksi internasional ketika membuat suatu kebijakan di masa depan.

Berdasarkan beberapa kasus besar yang ada, kebijakan melalui sanksi ekonomi sebagian besar tidak efektif. Daniel W. Drezner (Drezner, 1999) berpendapat bahwa kasus-kasus populer ini tidak representatif, namun membuat kesimpulan bahwa sanksi tidak efektif atau bermasalah. Drezner berpendapat bahwa pengirim mempertimbangkan kemungkinan konflik di masa depan dengan target ketika memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dan target mempertimbangkan harapan konflik ketika memutuskan untuk menolak paksaan. Teori ini menunjukkan efek paradoks: yaitu efek yang menunjukkan hasil yang bertentangan dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai ekspektasi.

Musuh akan saling memberi sanksi lebih sering tetapi dengan sedikit keberhasilan karena pengirim dan target peduli dengan reputasi keuntungan relatif, dan Sekutu akan lebih jarang memberikan sanksi tetapi dengan keberhasilan yang lebih besar karena kepedulian mereka terhadap kerugian ekonomi. Sehingga, Drezner membandingkan model ekspektasi konfliknya dengan dua teori. Teori yang pertama, berpendapat bahwa sanksi adalah sinyal untuk pemaksaan militer di masa depan dan teori yang kedua berpendapat bahwa sanksi didorong oleh tuntutan tindakan domestik.

Walaupun banyak kerugian yang didapat setelah diberlakukannya sanksi ekonomi, namun tidak sedikit negara yang menjadi target masih tetap melakukan pelanggaran, sehingga sanksi ekonomi yang diberikan dapat dikatakan gagal dalam mencapai tujuannya, dan dari peristiwa seperti ini muncul istilah bahwa sanksi ekonomi itu dapat bersifat paradoks. Seperti pada penelitian kali ini antara kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap program nuklir Korea Utara.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang sudah penulis jabarkan, terdapat hipotesis yang akan penulis ajukan yaitu; **“Tidak ada pengaruh sanksi ekonomi terhadap pembangunan program nuklir Korea Utara.”**

2.4 Definisi Operasional

Dalam proses menganalisa suatu data, data-data yang sudah didapat akan dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi suatu variabel dan indikator yang akan menjadikan proses analisi data menjadi lebih fokus juga efisien, atau disebut dengan definisi operasional. Menurut Utama (2016:52), definisi operasional juga dapat diartikan sebagai pemberian makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk mengukur, mengategorikan, atau memanipulasi variabel. Berikut adalah tabel definisi operasional;

Tabel 2.2 Definisi Operasional

Asumsi Hipotesis	Indikator	Fakta dan Data
Variabel bebas: Sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Korea Utara	Harta benda milik warga negara Amerika maupun warga negara asing akan dibekukan	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila adanya kerjasama dibidang perikanan, industri energi, teknologi informasi, medis, manufsktur dan tambang di Korea Utara. - Apabila mengoperasikan bandar udara/bandar laut di Korea Utara. - Apabila adanya aktivitas ekspor dan impor barang maupun jasa dengan Korea Utara. - Apabila adanya kegiatan komersial yang menguntungkan pihak Korea Utara. - Apabila memberikan dan menerima bantuan secara materi, finansial ataupun teknologi kepada entitas-entitas yang dikenakan sanksi menurut <i>Executive Order</i>. https://home.treasury.gov/system/files/126/nkorea.pdf <p>Sanksi itu datang setelah setidaknya dua uji coba</p>

	<p>Pemerintahan Biden memberi sanksi kepada delapan orang dan entitas atas keterlibatan mereka dalam mengembangkan senjata pemusnah massal dan program terkait rudal balistik.</p>	<p>rudal balistik Korea Utara yang diketahui. Departemen Keuangan pertama kali mengumumkan sanksi terhadap lima warga Korea Utara, kemudian Departemen Luar Negeri mengikuti dengan tindakan yang menargetkan satu warga Korea Utara, satu Rusia, dan satu entitas Rusia. Berikut adalah nama-nama 8 orang yang dikenakan sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choe Myong Hyon, warga negara DPRK yang berbasis di Rusia - Sim Kwang Sok, seorang kepala perwakilan yang berbasis di China yang telah bekerja untuk mendapatkan paduan baja - Kim Song Hun, perwakilan yang berbasis di China yang telah bekerja untuk pengadaan perangkat lunak dan bahan kimia - Kang Chol Hak, perwakilan yang berbasis di Tiongkok yang telah membeli barang dari perusahaan Tiongkok - Pyon Kwang Chol, wakil perwakilan dari perusahaan penyamaran yang dicurigai untuk organisasi bawahan Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua yang berlokasi di Tiongkok, tempat ia pertama kali ditugaskan untuk bekerja pada tahun 2014 - O Yong Ho, warga negara DPRK yang berbasis di Rusia - Roman Anatolyevich Alar, warga negara Rusia <p>https://www.cnbc.com/2022/01/12/us-sanctions-5-</p>
--	--	--

		north-koreans-over-weapons-programs-following-missile-launches.html
Variabel Terikat: Kebijakan sanksi ekonomi Amerika Serikat tidak mempengaruhi pembangunan senjata nuklir Korea Utara.	Korea Utara tetap melakukan uji coba penembakan rudal balistik.	Dengan banyaknya sanksi ekonomi yang diberlakukan kepada Korea Utara selama bertahun-tahun, sama sekali tidak mempengaruhi pembangunan nuklir Korea Utara. Tahun 2022 ini, Korea Utara masih terus melakukan uji coba penembakan rudal ke arah Jepang terhitung pada tanggal 5-10 Januari dan penembakan rudal terbaru pada tanggal 25 September-9 Oktober lalu. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60166323 https://www.dw.com/id/tes-rudal-latihan-nuklir-taktis-yang-diawasi-kim-jong-un/a-63388264

2.5 Skema dan Alur Penelitian

